



Hubungan Pengetahuan Dan Kemampuan Membayar Dengan Kepatuhan Pembayaran Premi Jkn-Kis Mandiri Kabupaten Pringsewu

Knowledge And Payment Ability Relationship With Compliance With The Premium Of Jkn-Kis Mandiri Pringsewu

Yenny Marthalena¹⁾, Sunarmi²⁾, Debby Sanjaya³

^{1, 2, 3)} Program Study Accounting, Faculty of Social and Business, Universitas Aisyah Pringsewu

Email: yennymarthalena.YM@gmail.com

How to Cite :

Yenny Marthalena. et. al (2021). *Knowledge And Payment Ability Relationship With Compliance With The Premium Of Jkn-Kis Mandiri Pringsewu*. *Bima Journal : Business, Management and Accounting Journal*, 2 (1). DOI: <https://doi.org/10.37638/bima.2.1.23-36>

ARTICLE HISTORY

Received [27 April 2020]

Revised [29 April 2020]

Accepted [24 May 2020]

ABSTRAK

Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia, cakupan kepesertaan JKN per 31 Desember 2014 mencapai 53%, sedangkan fenomena yang berkembang saat ini adalah sulitnya akses dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, hal ini disebabkan karena kepesertaan mandiri yang semakin meningkat tidak sejalan dengan kepatuhannya dalam membayar iuran JKN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan kemampuan membayar dengan kepatuhan pembayaran premi JKN-KIS Mandiri di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitik dengan menggunakan metode pendekatan *cross sectional*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta BPJS yang datang untuk membayar premi JKN-KIS Mandiri di Kantor BPJS wilayah Kecamatan Pringsewu dengan jumlah sampel sebanyak 90 orang. Analisis bivariat dalam penelitian ini menggunakan *uji chi square*. Hasil penelitian diketahui terdapat hubungan antara pengetahuan dan kemampuan membayar dengan kepatuhan pembayaran premi JKN-KIS Mandiri di

Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dengan nilai p value = 0,001 dan 0,043. Perlu dilakukan kajian ulang mengenai peraturan atau kebijakan yang telah terlaksana, dalam proses pelaksanaan maupun dalam penyusunan rencana terkait program Jaminan Kesehatan Nasional. Kajian tersebut harus yang bersumberkan dari lapangan secara langsung baik tentang tarif iuran, tata cara pendaftaran, tatacara pembayaran, keanggotaan kepesertaan, mutu pelayanan maupun kemauan ataupun kemampuan membayar masyarakat. Pemerintah daerah hendaknya mendata warga yang tidak mampu supaya dapat dilakukan intervensi dalam pendataan. Sehingga diharapkan masyarakat terpapar informasi tentang perlindungan kesehatan sehingga peningkatan kesadaran pembayaran premi JKN-KIS mandiri dapat berjalan dengan baik

ABSTRACT

Based Health Profile of Indonesia, the coverage JKN of December 31, 2014 reached 53%, while the growing phenomenon today is the difficulty of access to health services for the poor, it is because of membership standalone increasing inconsistent with compliance in paying dues JKN. The purpose of this study was to determine the relationship of knowledge and ability to pay the premium payment compliance self JKN-KIS in district Pringsewu. The design used in this study is an analytic using cross sectional method. The population in this study were all participants who came to pay a premium self JKN-KIS in office BPJS district Pringsewu with a sample size of 90 people. The bivariate analysis in this study using chi square test. The survey results revealed between knowledge and ability to pay the premium payment compliance self JKN-KIS in district Pringsewu with p value = 0.001 and 0.043. It is necessary to review the regulations or policies that have been implemented, in the implementation process and in the formulation of plans related to the National Health Insurance program. The study must be sourced directly from the field whether it is the fee for fees, registration procedures, payment procedures, membership, quality of service or the willingness or ability to pay the community. The local government should record the poor citizens so that interventions can be made in data collection. So that it is hoped that the public will be exposed to information about health protection so that increasing awareness of the independent JKN-KIS premium payment can run well

KEYWORDS

Knowledge, ability to pay, compliance

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license



PENDAHULUAN

Setiap penduduk di suatu negara membutuhkan perlindungan kesehatan sebagai kebutuhan dasar kehidupan. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah jaminan kesehatan. Asuransi kesehatan memberi jaminan berupa pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi para penduduk, sehingga masyarakat tidak mengeluarkan biaya yang terlalu besar untuk kesehatan, khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu (Murti, 2010)

Pada awal tahun 2014, pemerintah mulai menerapkan JKN yang bertujuan agar seluruh masyarakat Indonesia menjadi peserta JKN, sebagai perwujudan *universal health coverage*. Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia, cakupan kepesertaan JKN per 31 Desember 2014 mencapai 53% dari total warga Indonesia 253.934.048 juta jiwa, peserta PBI (37,4%) dan non PBI (15,6%) (Muninjaya, 2014)

Riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2013, cakupan kepemilikan jaminan kesehatan di Indonesia mencapai 52,3% diantaranya : Askes/ASABRI 6%, jamsostek 4,4%, askes swasta 1,7%, perusahaan 1,7%, jamkesmas 28,9%, jamkesda 9,6%, dengan demikian yang belum memiliki jaminan kesehatan 50,5%(4). Visi BPJS Kesehatan untuk tahun 2019 direncanakan seluruh penduduk Indonesia telah memiliki jaminan kesehatan untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang disebut Cakupan Semesta (Kesehatan & RI, 2013)

Fenomena yang berkembang saat ini adalah sulitnya akses dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Kesulitan pelayanan tersebut utamanya dipengaruhi oleh faktor finansial. Masyarakat miskin yang menderita sakit parah atau penyakit tergolong berat tidak dapat di sembuhkan karena ketiadaan biaya pengobatan sehingga pada akhirnya lambat ditangani atau tidak ditangani sama sekali yang mengakibatkan penyakitnya semakin parah bahkan mengakibatkan kematian, sehingga dengan dibentuknya BPJS Kesehatan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional diharapkan semua warga masyarakat khususnya masyarakat miskin dapat memiliki asuransi kesehatan yang akan menjamin pelayanan kesehatannya ketika membutuhkannya (Thabrany, 2014)

Biaya kesehatan yang semakin tinggi, serta risiko sakit yang dimiliki oleh semua orang menjadi dasar bagi seseorang untuk menjadi peserta JKN, dengan membayarkan iuran setiap bulannya yang disesuaikan dengan kemampuan setiap orang. Hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Gotong royong merupakan salah satu prinsip Jaminan Kesehatan yang implementasinya dilaksanakan lewat iuran. Iuran sangat berpengaruh terhadap kelancaran berjalannya BPJS Kesehatan agar tidak terjadinya defisit. Dalam pelaksanaannya, keteraturan dalam membayar iuran JKN bagi peserta mandiri merupakan komponen terpenting untuk mempermudah pemanfaatan pelayanan kesehatan. Bagi peserta JKN kategori pekerja mandiri wajib membayar iuran ke BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Apabila tanggal 10 jatuh pada

hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya. Bagi peserta kategori pekerja mandiri yang membayar iuran lewat tanggal 10 akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran iuran sebesar 2,5% per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 6 bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak, selain itu penjaminan akan dihentikan sementara jika keterlambatan pembayaran iuran lebih dari 6 bulan.

Berkaitan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan menyatakan bahwa adanya kenaikan iuran jaminan kesehatan. Kriteria iuran apabila peserta memilih manfaat pelayanan kelas rawat inap I maka besar iuran jaminan kesehatan yang harus dibayar setiap bulannya adalah Rp 80.000,- per orang, untuk kelas rawat inap II besar iuran adalah Rp 51.000,- per orang dan kelas rawat inap III besar iuran tetap sebesar Rp 25.500,- per orang dengan denda keterlambatan naik menjadi 2,5% per bulan dan penjaminan dihentikan sementara jika keterlambatan lebih dari 1 bulan. Ketentuan pemberhentian sementara penjaminan peserta dan pengenaan denda mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2016.

Kepesertaan mandiri yang semakin Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan Nasional tahun 2016 yaitu 171.677.287 dengan jenis terbesar adalah peserta PBI APBN berjumlah 91.113.999 peserta, Pegawai Swasta 23.511.190, Mandiri berjumlah 19.144.321, Jamkesda berjumlah 15.396.711, PNS berjumlah 13.252.905, TNI berjumlah 1.557.450, POLRI berjumlah 1.220.059 dan bukan pekerja berjumlah 5.056.819.

Hasil wawancara dengan bagian Keuangan BPJS Kesehatan Bandar Lampung diketahui bahwa Jumlah peserta BPJS Provinsi Lampung per Oktober 2016 adalah 5.087.698 jiwa, peserta mandiri 651.806 dan yang menunggak 306.348 peserta (47,06%). Selain itu untuk jumlah peserta BPJS mandiri Kabupaten Pringsewu bulan Oktober 2016 adalah 9.723 jiwa yang setiap bulannya mengalami peningkatan jumlah peserta. Pada bulan Oktober 2015, peserta mandiri di Pringsewu yang tidak patuh membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional sebanyak 2.695 peserta (27,71%). Dalam hal ini pada bulan Oktober 2016 di Kecamatan Pringsewu mengalami peningkatan peserta mandiri yang tidak patuh (lebih dari 3 bulan menunggak) membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional adalah sebanyak 853 peserta yaitu 48,6% dari 1755 total peserta.

Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang tidak patuh dalam membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional. Hal ini dapat dijelaskan dengan teori perilaku oleh Green yang menyatakan bahwa perilaku kesehatan dipengaruhi oleh faktor predisposisi, faktor pemungkin dan faktor pendorong. Faktor yang berhubungan dengan kepatuhan dalam membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional oleh peserta mandiri ialah tingkat pendidikan, pekerjaan, jumlah pendapatan, jumlah anggota keluarga dan pengetahuan (Notoatmodjo, 2010)

Survey awal yang dilakukan kepada 25 orang responden yang memenuhi kriteria didapatkan 70% responden tidak patuh dalam membayar iuran JKN, hal ini

disebabkan karena responden tidak membutuhkan pengobatan dalam waktu dekat, tetapi sebanyak 60% responden mengetahui tentang JKN sedangkan dilihat dari tingkat pendidikan responden, rata-rata adalah lulusan SMA yang tergolong ke dalam kategori pendidikan menengah. Selain itu responden telah memiliki pekerjaan, dan rata-rata pendapatan responden berkisar antara Rp. 500.000 – Rp. 1.500.000 dengan jumlah anggota keluarga yang tergolong besar, dan secara keseluruhan responden merasa terbebani dengan kenaikan iuran BPJS.

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan kemampuan membayar dengan kepatuhan pembayaran premi JKN-KIS Mandiri di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah analitik menggunakan desain studi *cross sectional*. Polulasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta BPJS yang datang untuk membayar premi JKN-KIS Mandiri di Kantor BPJS wilayah Kecamatan Pringsewu dengan jumlah sampel sebanyak 90 orang. enelitian ini dilaksanakan di kediaman peserta JKN-KIS Kabupaten Pringsewu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Analisis Univariat

a. Tinggi Pengetahuan

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pengetahuan Peserta Premi JKN-KIS Mandiri di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu

Pengetahuan	Frekuensi (N)	Persentase (%)
Baik	35	38,9
Cukup	38	42,2
Kurang	17	18,9
Total	90	100%

Sumber : Data Primer 2021

Berdasarkan tabel diketahui bahwa dari 90 responden terdapat 35 responden (38,9%) berpengetahuan baik, terdapat 38 responden (42,2%) berpengetahuan cukup dan terdapat 17 responden (18,9%) berpengetahuan kurang.

b. Kemampuan Membayar

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kemampuan Membayar Peserta Premi JKN-KIS Mandiri di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu

Kemampuan	Frekuensi (N)	Persentase (%)
Mampu	36	40,0
Tidak Mampu	54	60,0
Total	90	100%

Sumber : Data Primer 2021

Berdasarkan tabel diketahui bahwa dari 90 responden terdapat 36 responden (40%) dalam kategori mampu dan terdapat 54 responden (60%) dalam kategori tidak mampu dalam membayar iuran premi JKN-KIS mandiri.

c. Kepatuhan

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kepatuhan Pembayaran Premi JKN-KIS Mandiri di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu

Kepatuhan	Frekuensi (N)	Persentase (%)
Patuh	42	46,7
Tidak patuh	48	53,3
Total	90	100%

Sumber : Data Primer 2021

Berdasarkan tabel diketahui bahwa dari 90 responden terdapat 42 responden (46,7%) patuh dan terdapat 48 responden (53,3%) tidak patuh dalam pembayaran iuran JKN-KIS mandiri.

2. Analisis Bivariat

a. Hubungan Pengetahuan dengan Kepatuhan Pembayaran Premi JKN-KIS Mandiri

Tabel 4. Hubungan Pengetahuan dengan Kepatuhan Pembayaran Premi JKN-KIS Mandiri di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu

Pengetahuan	Kepatuhan				Total		P Value
	Patuh		Tidak Patuh		N	%	
	N	%	N	%			
Baik	24	26,7	11	12,2	35	38,9	0,001
Cukup	15	16,7	23	25,6	38	42,2	
Kurang	3	3,3	14	15,6	17	18,9	
Jumlah	42	46,7	48	53,3	90	100	

Sumber : Data Primer 2021

Berdasarkan tabel diketahui bahwa dari 35 responden berpengetahuan baik terdapat 24 responden (26,7%) patuh dalam pembayaran iuran premi JKN-KIS mandiri dan terdapat 11 responden (12,2%) tidak patuh. Dari 38 responden berpengetahuan cukup terdapat 15 responden (16,7%) patuh dan 23 responden (25,6%) tidak patuh dalam pembayaran iuran premi JKN-KIS mandiri. Sedangkan dari 17 responden berpengetahuan kurang terdapat 3 responden (3,3%) patuh dan terdapat 14 responden (15,6) tidak patuh dalam pembayaran iuran premi JKN-KIS mandiri. Hasil uji statistik didapatkan nilai p value 0,001 dan nilai $\alpha = < 0,05$ maka dapat disimpulkan terdapat hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan pembayaran iuran premi JKN-KIS mandiri.

b. Hubungan Kemampuan Membayar dengan Kepatuhan Pembayaran Premi JKN-KIS Mandiri

Tabel 5. Hubungan Kemampuan Membayar dengan Kepatuhan Pembayaran Premi JKN-KIS Mandiri di Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu

Kemampuan	Kepatuhan				Total		P -Value	OR (95% CI)
	Patuh		Tidak Patuh		N	%		
	N	%	N	%				
Mampu	22	24,4	14	15,6	36	40	0,043 2,671 1,121 – 6,366	
Tidak Mampu	20	22,2	34	37,8	54	60		
Jumlah	42	46,7	48	53,3	90	100		

Sumber : Data Primer 2021

Berdasarkan tabel hasil analisis antara kemampuan membayar dengan kepatuhan pembayaran diperoleh bahwa ada sebanyak 36 responden mampu membayar terdapat 22 (24,4%) responden patuh dan sebanyak 14 (15,6%) tidak patuh. Sedangkan diantara 54 responden tidak mampu membayar terdapat 20 (22,2%) patuh dalam iuran dan terdapat 34 (37,8%) tidak patuh dalam pembayaran. Hasil uji statistik diperoleh nilai p value = 0,043 $\alpha < 0,05$, maka dapat disimpulkan ada hubungan kemampuan membayar dengan kepatuhan pembayaran iuran premi JKN-KIS Mandiri. Dari hasil analisis diperoleh pula nilai OR = 2,671, artinya responden tidak mampu dalam membayar berpeluang 2,671 kali tidak patuh membayar iuran JKN-KIS mandiri dibandingkan dengan responden mampu dalam membayar.

Pembahasan

1. Analisis Univariat

a. Pengetahuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pengetahuan responden tentang JKN-KIS mandiri dalam kategori cukup yaitu sebanyak responden (42,2%). Pengetahuan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan pembayaran JKN-KIS mandiri. Jika seseorang memiliki pengetahuan yang cukup maka akan termotivasi untuk berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang didapatnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Notoatmodjo (2010), yang mengatakan bahwa pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya perilaku seseorang (upaya pengobatan penyakitnya).

Menurut (Muninjaya, 2014) pengetahuan adalah sebagai suatu pembentukan yang terus menerus oleh seseorang yang setiap saat mengalami reorganisasi karena adanya pemahaman-pemahaman baru. Pengetahuan adalah sebagai suatu pembentukan yang terus menerus oleh seseorang yang setiap saat mengalami organisasi karena adanya pemahaman-pemahaman baru.

Berdasarkan Penelitian (Widyasih, 2014) tentang evaluasi proses pendataan program JKN-KIS kesehatan menunjukkan program JKN-KIS masih dianggap belum optimal, bahkan sebagian besar masyarakat belum mengetahui dan masih kebingungan terkait program ini, selain itu rendahnya tingkat pengetahuan dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Hal ini dikarenakan karena responden memiliki tingkat pendidikan yang cukup dan mampu menerima informasi mengenai JKN-KIS sehingga sebagian besar peserta mengikuti program JKN-KIS.

Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka peneliti berasumsi bahwa seseorang yang memiliki pengetahuan baik dan cukup cenderung memiliki perilaku yang baik terutama dalam pembayaran JKN-KIS, hal ini dikarenakan responden yang memiliki pengetahuan baik dan cukup memiliki informasi dan pengalaman yang banyak, semakin banyak informasi yang didapat maka

pengetahuan seseorang akan bertambah baik dengan semakin banyaknya informasi yang didapat maka pola pikirnya seseorang akan semakin terbuka dan dapat mencari solusi dari suatu masalah, semakin banyak pengalaman seseorang maka pengetahuannya akan menjadi baik dimana pengalaman yang banyak akan menjadi suatu perbandingan dan pembelajaran bagi seseorang untuk menentukan sikap yang lebih baik, sehingga sikap yang ditunjukkan cenderung positif.

b. Kemampuan Membayar

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar responden dalam kategori tidak mampu dalam membayar iuran premi JKN-KIS mandiri yaitu sebanyak 54 responden (60%). Hal ini dikarenakan rendahnya pendapatan peserta JKN-KIS untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari dan dilihat dari jenis pekerjaan peserta JKN-KIS yaitu sebagian besar jenis pekerjaannya adalah petani yaitu sebanyak 39 responden (43,3%). Selain itu sifat alami penyakit, frekuensi, lama sakit dan besarnya biaya yang diperlukan. Sifat alami penyakit ini berdampak kritis terhadap ATP keluarga. Penyakit yang sifatnya akut akan membebani keluarga secara tiba-tiba dan mengharuskan mobilisasi dana secara cepat, sebaliknya, penyakit kronis, memerlukan pembiayaan dalam jangka panjang dan berimplikasi panjang pula terhadap sumberdaya dalam rumah tangga.

Ability To Pay (ATP) adalah kemampuan seseorang untuk membayar jasa pelayanan yang diterimanya berdasarkan penghasilan yang dianggap ideal (Aryani & Muqorrobin, 2013). Prinsip yang digunakan untuk mewujudkan akses pelayanan kesehatan yang adil menurut Murti (2010) adalah dengan menggunakan prinsip keadilan vertikal. Prinsip keadilan vertikal menegaskan, kontribusi warga dalam pembiayaan kesehatan ditentukan berdasarkan kemampuan membayar (*ability to pay*), bukan berdasarkan kondisi kesehatan/ kesakitan seorang. Dengan keadilan vertikal, orang berpendapatan lebih rendah membayar biaya yang lebih rendah daripada orang berpendapatan lebih tinggi untuk pelayanan kesehatan dengan kualitas yang sama. Dengan kata lain, biaya tidak boleh menjadi hambatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.

Menurut (Yandrizal et al., 2017) dalam penelitiannya Analisis Kemampuan dan Kemauan Membayar Iuran Terhadap Pencapaian UHC JKN di Kota Bengkulu, menyatakan bahwa seseorang yang tidak mampu membayar iuran akan mempengaruhi kemauannya dalam membayar iuran JKN. Hal juga ini berkaitan dengan pendapatan yang dimiliki orang tersebut namun disatu sisi harus diperhatikan jumlah pengeluaran mereka terhadap kebutuhan nonpangan. Semakin tinggi pendapatan yang dimiliki, semakin besar kemampuan membayarnya maka akan semakin mempengaruhi kemauan membayarnya terhadap pelayanan kesehatan. Hal ini termasuk pada asuransi kesehatan seperti membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional pada peserta mandiri (Yandrizal et al., 2017).

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti berasumsi bahwa keterbatasan ekonomi yang menyebabkan pembayaran iuran untuk kesehatan tidak menjadi prioritas dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, selain itu peserta yang mengikuti JKN-KIS mandiri merupakan mereka yang sudah bekerja dan memiliki pendapatan lebih tinggi serta dapat menyeimbangkan pengeluaran rata-rata antara pengeluaran pangan dan non pangan, sehingga sebagian besar dari mereka sudah menyisihkan pendapatan yang digunakan untuk pembayaran asuransi begitu pula sebaliknya bagi mereka yang berpendapatan rendah, sebagian besar tidak bisa menyeimbangkan antara kebutuhan pangan dan non pangan karena masih lebih memprioritaskan kebutuhan pangan dibandingkan kebutuhan non pangan.

c. Kepatuhan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak patuh dalam dalam pembayaran iuran JKN-KIS mandiri yaitu sebanyak 48 responden (53,3%). Hal ini selain dipengaruhi faktor pengetahuan juga dapat dipengaruhi faktor lain seperti pendapatan yang mereka miliki dan kemampuan mereka setelah dihitung masih rendah atau faktor lainnya.

Kepatuhan dalam pembayaran iuran adalah perilaku seseorang yang memiliki kemauan membayar iuran secara tepat berdasarkan waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan ketidakpatuhan atau kepatuhan negatif merupakan suatu kondisi pada individu atau kelompok yang sebenarnya mau melakukan tetapi dicegah dari melakukannya oleh faktor-faktor yang menghalangi ketaatan terhadap anjuran yang berhubungan dengan kesehatan yang diberikan oleh profesional kesehatan (Carpenito, 2011).

Menurut (Arfiliyah Nur Pratiwi, 2019) dalam penelitiannya Faktor yang mempengaruhi keteraturan membayar iuran pada peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) kategori peserta mandiri (studi kasus pasien rawat Inap Rumah Sakit Dr. Soebandi Kabupaten Jember). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 35 pasien peserta mandiri JKN rawat inap menyatakan bahwa 25 (71%) pasien tersebut tidak teratur dalam membayar iuran JKN. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa beberapa faktor yang berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pembayaran iuran JKN antara lain kurangnya pengetahuan tentang keterbatasan ekonomi dan adanya prioritas non-kesehatan, ketidakpuasan akan kualitas layanan kesehatan yang diterima dengan menggunakan BPJS, kurangnya pengetahuan tentang pembayaran iuran dan konsekuensi ketidakpatuhan pembayaran iuran, tidak adanya notifikasi atau *reminder* mengenai pembayaran iuran, sistem pembayaran iuran yang sering bermasalah, masih adanya tanggungan peserta JKN-KIS mandiri, persepsi tentang rendahnya risiko sakit dan risiko pengeluaran katastroofik.

Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka peneliti berasumsi bahwa kurangnya pengetahuan peserta mengenai pembayaran iuran termasuk

konsekuensi ketidakpatuhan pembayaran iuran merupakan faktor penghambat keberlanjutan pembayaran iuran pada peserta JKN Mandiri.

2. Analisis Bivariat

a. Hubungan Pengetahuan dengan Kepatuhan Pembayaran Premi JKN-KIS Mandiri

Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat hubungan pengetahuan dengan kepatuhan pembayaran premi JKN-KIS mandiri dimana dibuktikan diperoleh nilai p value 0,001 dan nilai $\alpha = < 0,05$.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (*mandatory*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah dan sudah terlaksana mulai 1 Januari 2014 yang diselenggarakan oleh suatu badan hukum yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (JKN, 2014). Bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi yang baik bukanlah suatu masalah mengeluarkan biaya mahal untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, namun jika masalah itu dialami pada masyarakat dengan ekonomi yang rendah yang tidak mampu mengeluarkan biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan maka ketiadaan jaminan kesehatan menjadi suatu jebakan kemiskinan bahkan kematian. Hal tersebut karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan program JKN. Masih begitu banyak masyarakat yang bingung bahkan tidak tahu tentang program JKN. Sikap terhadap program JKN juga masih berbeda-beda karena masih begitu banyak masyarakat yang mendukung maupun tidak mendukung terhadap program JKN yang sebenarnya bersifat wajib seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang.

Menurut Anne Mils dan Lucy Gibson (2009), untuk banyak komoditi, para konsumen biasanya mempunyai pengetahuan tentang barang dan produk yang akan dibelinya atau mereka dapat memperoleh informasi dari pengetahuan yang ada. Untuk pelayanan kesehatan, pengetahuan seseorang tentang pelayanan yang diterima masih sangat terbatas. Masyarakat mau menggunakan pelayanan kesehatan apabila mereka sakit dan informasi yang mereka punya berdasarkan pengetahuan mereka ketika mereka sakit sebelumnya. Penggunaan pelayanan kesehatan ini merupakan penetapan keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang diterima secara lengkap. Demikian halnya dalam kemauan membayar, responden mau membayar ketika merupakan suatu kewajiban dan mereka telah memiliki pengalaman dalam menggunakan JKN itu sendiri.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Erlita, 2015) karena dalam penelitiannya terbukti adanya hubungan antara pengetahuan terhadap

kemauan membayar pasien. Pengetahuan yang dimiliki seseorang tentang pelayanan kesehatan akan mempengaruhi persepsinya tentang biaya pelayanan kesehatan yang akan dikeluarkan. Hal ini dikarenakan persepsi adalah hasil proses pengamatan dari komponen kognisi. Selain itu, persepsi juga dipengaruhi oleh faktor pengalaman, proses belajar, wawasan, dan pemikiran. Teori Lawrence Green pun tidak berlaku dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa pengetahuan merupakan salah satu faktor predisposing seseorang dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka peneliti berasumsi bahwa banyaknya masyarakat terutama masyarakat yang sangat kurang mampu memanfaatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memeriksakan berbagai keluhan masalah kesehatan. Hal ini bisa kita lihat di pelayanan kesehatan milik pemerintah. Pengetahuan masyarakat yang minim tentang BPJS dan prosedur menjadi peserta JKN menjadi penyebab kurangnya pemahaman masyarakat tentang JKN. Maka untuk itu BPJS-lah yang harus melakukan sosialisasi pada masyarakat. Namun begitu, masyarakat yang belum mendaftar menjadi anggota JKN, untuk segera mendaftarkan dirinya, karena program nasional ini benar-benar sangat membantu masyarakat

b. Hubungan Kemampuan Membayar dengan Kepatuhan Pembayaran Premi JKN-KIS Mandiri

Hasil penelitian menunjukkan uji statistik ada hubungan kemampuan membayar dengan kepatuhan pembayaran iuran premi JKN-KIS Mandiri dan didapatkan nilai p value = 0,043 $\alpha < 0,05$. Hasil analisis diperoleh pula nilai OR = 2,671, artinya responden tidak mampu dalam membayar berpeluang 2,671 kali tidak patuh membayar iuran JKN-KIS mandiri dibandingkan dengan responden mampu dalam membayar.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Handayani (2013), bahwa responden dengan ATP \geq Rp.88.500,- perbulan terdapat pengaruh yang signifikan dengan WTP untuk iuran jaminan kesehatan, yang dapat dilihat dari nilai p 0,002. Hasilnya juga menunjukkan kecenderungan memiliki WTP positif.

Penentuan kemampuan membayar (*ability to pay*) ini ditentukan berdasarkan pengeluaran responden terhadap kebutuhan non pangan. Asumsinya jika seseorang mampu mengeluarkan sejumlah uang untuk kebutuhan non pangan maka tentu ia juga mampu mengeluarkan biaya untuk kesehatan yang sifatnya esensial (Yandrizal et al., 2017)

Penelitian membuktikan menyatakan bahwa seseorang yang tidak mampu membayar iuran akan mempengaruhi kemauannya dalam membayar iuran JKN. Hal juga ini berkaitan dengan pendapatan yang dimiliki orang tersebut namun disatu sisi harus diperhatikan jumlah pengeluaran mereka terhadap kebutuhan nonpangan.

Menurut (Murti, 2010) semakin tinggi pendapatan yang dimiliki, semakin besar kemampuan membayarnya maka akan semakin mempengaruhi kemauan membayarnya terhadap pelayanan kesehatan. Hal ini termasuk pada asuransi kesehatan seperti membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional pada peserta mandiri.

Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka peneliti berasumsi bahwa permasalahan yang sering dihadapi adalah terkadang banyak peserta yang melupakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran iuran tiap bulannya, dan hanya memperhatikan haknya saja sehingga peserta pun melupakan juga prinsip yang di pegang BPJS Kesehatan dalam hal gotong royong, yang mana pihak yang mampu atau yang dapat dikatakan peserta JKN-KIS mandiri dan mempunyai pendapatan yang tinggi berkewajiban membantu kelompok yang berpendapatan rendah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan Sebagian besar responden dalam kategori tidak mampu dalam membayar iuran premi JKN-KIS mandiri yaitu sebanyak 54 responden (60%).

Sebagian besar pengetahuan responden tentang JKN-KIS mandiri dalam kategori cukup yaitu sebanyak responden (42,2%). Sebagian besar responden tidak patuh dalam dalam pembayaran iuran JKN-KIS mandiri yaitu sebanyak 48 responden (53,3%). Terhadap hubungan kemampuan membayar dengan kepatuhan pembayaran iuran premi JKN-KIS Mandiri dan nilai p value = 0,043 $\alpha < 0,05$. Terdapat hubungan pengetahuan dengan kepatuhan pembayaran premi JKN-KIS mandiri dimana dibuktikan diperoleh nilai p value 0,001 dan nilai $\alpha = < 0,05$.

Saran

Agar masyarakat terpapar informasi tentang perlindungan kesehatan sehingga peningkatan kesadaran pembayaran premi JKN-KIS mandiri dapat berjalan dengan baik. Maka perlu dilakukan kajian ulang mengenai peraturan atau kebijakan yang telah terlaksana, dalam proses pelaksanaan maupun dalam penyusunan rencana terkait program Jaminan Kesehatan Nasional. Kajian tersebut harus yang bersumberkan dari lapangan secara langsung baik tentang tarif iuran, tata cara pendaftaran, tatacara pembayaran, keanggotaan kepesertaan, mutu pelayanan maupun kemauan ataupun kemampuan membayar masyarakat. Pemerintah daerah hendaknya mendata warga yang tidak mampu supaya dapat dilakukan intervensi dalam pendataan

DAFTAR PUSTAKA

- Arfiliyah Nur Pratiwi. (2019). Faktor yang mempengaruhi keteraturan membayar iuran pada peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) kategori peserta mandiri (studi kasus pasien rawat Inap Rumah Sakit Dr. Soebandi Kabupaten Jember). In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). [https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/73502/112110101084--Arfiliyah Nur Pratiwi-1-80.pdf?sequence=1](https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/73502/112110101084--Arfiliyah%20Nur%20Pratiwi-1-80.pdf?sequence=1)
- Aryani, M., & Muqorrobin, M. (2013). Determinan Willingness To Pay (Wtp) Iuran Peserta Bpjs Kesehatan. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 14(1), 44-57. <https://doi.org/10.18196/jesp.14.1.1245>
- Carpenito, L. . (2011). *Buku Saku Diagnosa Keperawatan*. EGC.
- Erlita, K. (2015). Kebutuhan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Wilayah Perdesaan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 7(1), 1-7.
- Kesehatan, Adan P. dan P., & RI, K. K. (2013). *Riset Kesehatan Dasar* (Adan P. dan P. Kesehatan & K. K. RI (eds.)). Adan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. %0ARiset Kesehatan Dasar - Pusdatin Kemkeswww.pusdatin.kemkes.go.id > Hasil Riskesdas 2013
- Muninjaya. (2014). *Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan*. EGC.
- Murti, B. (2010). *Dasar-Dasar Asuransi Kesehatan*No Title. Kanisius.
- Notoatmodjo. (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. PT. Rineka Cipta.
- Thabrany, H. (2014). *Jaminan Kesehatan Nasional*. PT.Grafindo Persada.
- Widyasih. (2014). *Persepsi Masyarakat*. PT Rineka Cipta.
- Yandrizal, Y., Rifa'i, R., & Utami, S. P. (2017). Analisis Kemampuan Dan Kemauan Membayar Iuran Terhadap Pencapaian Uhc Jkn Di Kota Bengkulu. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 10(1), 3. <https://doi.org/10.24893/jkma.v10i1.156>